

# SUKSESI KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

Oleh  
BAMBANG SUPRIYADI

*Kepemimpinan pasca Soekarno di Indonesia diwarnai dominasi militer khususnya Angkatan Darat yang beraliansi dengan teknokrat untuk merealisasi pseudo - idiologi rezim orde baru yaitu pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam stabilitas nasional. Lembaga presiden merupakan unsur yang paling menentukan kehidupan negara, keberhasilan orde baru dalam melaksanakan pembangunan dan penyelesaian secara cepat atas persoalan politik merupakan legitimasi yang sangat penting bagi rezim Soeharto. Dalam regimentasi sosial politik penyebab kekuatan birokrasi dan militer mempunyai kesempatan yang besar sekali untuk menopang kekuasaan Presiden dan memungkinkan melahirkan pemimpin nasional yang lain. Untuk suksesi ke depan perlukah dipersiapkan atau berproses secara alamiah dan teratur dengan sidang-sidang MPR. Yang jelas para pemimpin di Indonesia selalu takut dengan cara-cara pemaksaan atau kekerasan, oleh karena itu "mempersiapkan suksesi" adalah salah satu jalan yang rupanya diinginkan oleh para pemimpin negara untuk melahirkan pemimpin baru.*

## I. PENDAHULUAN

Munculnya seorang pemimpin dapat dipahami sebagai akibat norma sosial sebagai suatu kebutuhan dan konsensus atau general agreement dalam masyarakat tersebut. Pendekatan konsensus ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem dimana bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain. Interaksi sosial selalu menuju integrasi sosial dan equilibrium yang dinamis dan faktor yang menentukan integrasi sistem sosial adalah konsensus dalam masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Pemimpin dipahami sebagai simbol untuk menjaga sistem sosial dan tertib atas dasar norma sosial yang ada.

Berbeda dengan pendekatan konsensus, pendekatan coercion memahami masyarakat selalu mengandung konflik. Konflik merupakan gejala unsur dalam masyarakat mempunyai

potensi bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat hanya dapat terintegrasi melalui dominasi atau coercion oleh kelompok sosial lainnya. Dahrendorf menggambarkan sistem seperti ini dengan istilah ICAS (Imperatively Coordinated Associations)

Dengan demikian bangunan sistem sosial terintegrasi sebenarnya atas dominasi sekelompok orang terhadap masyarakat. Hanya dengan coercionlah masyarakat akan terwujud membangunnya. Ini berarti hubungan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas melalui coercion. Mereka yang mempunyai otoritas akan menguasai kelompok yang tidak mempunyai otoritas dan yang tidak mempunyai kepentingan antara yang mempunyai otoritas dengan yang tidak mempunyai otoritas berbeda. (Jonathan H. Turner, 1978).

Dari pendekatan coercion muncul pemimpin dianggap sebagai simbol kekuatan yang memaksa mereka untuk tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut.

\* Penulis adalah Dosen Tetap Fisip  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*Dengan kata lain, pemimpin bukan hasil dari konsensus bersama, akan tetapi lebih merupakan unsur dominasi pemimpin atas masyarakat.*

Persoalannya adalah, bagaimanakah pemimpin itu bisa muncul? Menurut pendekatan behavioral, faktor-faktor psikologislah yang membikin seorang pemimpin bisa muncul. Bagi pendekatan ini terjadi interaksi antara 3 komponen, yaitu faktor lingkungan, predisposisi dan political response. Faktor lingkungan ini meliputi, lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Lingkungan merupakan inteseden variabel muncul sikap seseorang. Karena itu lingkungan tidak saja yang melingkupi seseorang, akan tetapi yang lebih penting kemudian adalah lingkungan sebagaimana ditafsirkan oleh seseorang tersebut. Faktor lingkungan ini akhirnya membentuk predisposisi seseorang, yaitu suatu kecenderungan psikis yang sudah siap untuk memberikana reaksi tertentu secara psikologis, bergantung pada stimulus yang diberikan.

Dan akhirnya dari kedua faktor itu memunculkan political response dari seseorang untuk bertindak menjadi aktor politik tertentu.

Bagi penganut Marxisme konservatif tidak percaya kepada peranan dan eksistensi pemimpin. Mereka juga tidak percaya faktor psikologis begitu berperan. Di dalam masyarakat selalu terjadi konflik antar kelas. Selama masih terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat, selama itu pula akan terjadi konflik kelas dalam masyarakat.

Karena itu bagi pendekatan Marxisme konservatif yang esensial dalam masyarakat adalah adanya konflik kelas. Pemimpin merupakan akibat dari konflik kelas dari masyarakat. Struktur sosial dan ekonomi sudah berjalan sedemikian rupa sehingga munculnya pemimpin merupakan bagian dari arus umum besar sejarah (part of the general course of development). Menurut bahasa, Miliband adalah trans generational history, yaitu suatu proses sejarah yang menganggap individu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk memainkan peran menentukan.

Di dalam teori sosial movement Niel Smellser mengungkapkan pentingnya pemimpin dalam memobilisir suatu gerakan sosial dan politik. Tanpa unsur pemimpin niscaya social movement tidak akan muncul ke permukaan, apalagi untuk berhasil mencapai

tujuan. (Mark N.Hagopian, 1978). Senada dengan Niel Smellser adalah Erick Hoffer dan Gustave Le Bon yang menganggap pentingnya pemimpin dalam melahirkan dan menentukan keberhasilan suatu gerakan sosial dan politik (Mark N.Hagopian, 1976).

***Dari pendekatan coercion muncul pemimpin dianggap sebagai simbol kekuatan yang memaksa mereka untuk tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Dengan kata lain, pemimpin bukan hasil dari konsensus bersama, akan tetapi lebih merupakan unsur dominasi pemimpin atas masyarakat.***

#### **Kecenderungan Pemimpin**

Pemimpin atau penguasa ketika memegang kekuasaannya cenderung menggunakan berbagai kehidupan masyarakat untuk dieksploitasi sehingga menguntungkan kepentingannya. Tidak itu saja, bahkan penguasa sering kali mampu mengembangkan apa yang disebut Gaetano Mosta sebagai suatu political formula atau bahasa pareto adalah derivitions of politics, yaitu merupakan basis moral dan hukum bagi keberadaan para elit

dalam benteng kekuasaannya. Untuk menginterogasi aspirasi masyarakat dengan elite maka perlu suatu "instrumen kohesi moral". Tanpa instrumen secara itu, eksistensi elit akan cenderung dipersoalkan masyarakat.

Dengan demikian ketika pemimpin berkuasa cenderung mensosialisasikan dan memaksakan kepentingannya kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol public. Bahkan pemimpin, kalau dipahami dengan pendekatan coercion, berusaha menggunakan kekuasaannya sebagai instrument untuk memenuhi kepentingannya.

Ralp Miliband menguatkan pendapat di atas, yaitu adanya usaha dari penguasa, pemimpin, untuk mempertahankan kekuasaannya dan membenarkan tindakannya dengan cara process of massive indoctrination. Penguasa atau pemimpin merupakan lembaga fungsional dari negara berusaha memobilisasi ideologi untuk membenarkan tindakannya dalam masyarakat. Menurut Althusser secara institusional ada dua institusi yang terlibat dalam memobilisasi ideologi, yaitu pertama Repressive State Apparatus (RSA) dan kedua Ideological State Apparatus (ISA). Lembaga yang pertama berperang untuk memelihara kekuasaan negara melalui kekuatan fisik, seperti polisi dan militer. Lembaga yang kedua merupakan lembaga yang berperan membenarkan keabsahan penguasa melalui penyebaran ideologi negara. Kalau negara dipertahankan melalui RSA berarti negara itu dipertahankan secara direct domination. Kalau dipertahankan melalui ideologi maka disebut indirect domination (Allan Swingewood, 1977)

Kesimpulan teoritisnya adalah, pola kepemimpinan yang kompleks dan berjenjang-jenjang. Kehadiran pemimpin mungkin sebagai simbol eksploitasi antara mereka yang memimpin dan yang dipimpin atau bahkan merupakan konsensus diantara masyarakat tersebut untuk mengukuhkan sistem sosial dengan cara memunculkan pemimpin yang mereka kehendaki.

Pemimpin ketika mereka berkuasa selalu berusaha mempertahankan legitimasi kekuasaannya, baik melalui lembaga ideologi maupun lembaga militer. Mereka selalu membikin political formula atau mengusahakan tercapainya hegemoni negara dengan cara ISA.

## II Fenomena kepemimpinan pada sistem politik Demokrasi Pancasila.

Dari konsep dasar kepemimpinan tersebut akan dianalisa fenomena kepemimpinan dalam periode sistem politik Demokrasi Pancasila. Ini berarti sifat bahasanya hipotesis. Kita semua masih memerlukan penelitian lebih teliti dan tekun untuk menyingkap fenomena kepemimpinan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Setelah rezim Sukarno runtuh di tahun 1967 yang muncul mendominasi kekuasaan negara adalah militer. Khususnya TNI AD. Dalam menjalankan pemerintahan militer beraliansi dengan para teknokrat untuk merealisasi pseudo-ideologi rezim orde baru, yaitu pertumbuhan ekonomi (pembangunan) dalam stabilitas nasional.

Soeharto di awal kekuasaannya menggunakan strategi "reformasi nanti", yaitu melakukan reformasi politik secara bertahap, kompromi dengan mempengaruhi para pemimpin oligarki partai, dan penekanan dwifungsi ABRI pada kekarayaan dalam urusan non militer (Mohtar Mas'ood, 1989).

Soeharto secara gradual dan sistematis menetralkan kekuatan negara dari kekuatan sosial dan politik yang radikal, baik di dalam tubuh militer maupun sipil. Mulai tahun 1968, Jenderal (Purn) Soeharto memulai membentuk suatu koalisi baru dalam parlemen, yang dinamakan Fraksi Pembangunan, setelah beberapa anggotanya yang radikal berhasil direcall. Sekitar 20% anggota fraksi Pembangunan diangkat oleh Presiden Soeharto untuk menghadapi Pemilu 1971.

Presiden Soeharto juga memberi ijin terbentuknya Parnpol Islam baru, pengganti

Masyumi, yaitu Parmusi asalkan yang menjadi pemimpin bukan orang-orang Masyumi yang fundamentalis maupun reformis (klasifikasi Allan A. Samson). Begitu pula pimpinan di tubuh PNI secara pelan-pelan berubah pimpinan yang akomodasionis.

Setelah Pemilu 1971 dengan kemenangan Sekber Golkar secara mutlak, maka pada tahun 1973 parpol "dipaksa" untuk melakukan fusi menjadi 3, yaitu Golkar, PPP dan PDI. Sejak saat itu Parpol, khususnya PPP dan PDI berkembang menjadi partai politik bonsai, tidak akan menjadi besar, tetapi tidak akan mati. Partai Politik menjadi lembaga politik yang tidak menentukan public policy, kebijaksanaan negara banyak dikuasai oleh militer, teknokrat dan presiden.

Dwight Y. King dengan tesisnya Bureaucratic-Authoritarian melihat yang menentukan policy negara adalah aliansi dan oligarki birokrasi militer secara institusional. Akan tetapi pendapat itu dikoreksi oleh Mochtar Mas'ood dengan mengatakan, lembaga kepresidenan merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan negara disamping unsur lainnya tersebut.

Lebih kultural Karl D. Jackson menganggap yang menentukan negara Indonesia hanya sekitar 100 orang di Jakarta, meliputi lembaga birokrasi, hankam dan presiden (Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, eds, 1978). Sedangkan bagi model Neopatrimonial, yang paling menentukan policy negara sejak jaman rezim Soeharto adalah pemimpin yang bersifat personal, yaitu presiden sendiri. Dan keputusan itu dianggap bersifat personal (Dwight Y. King, 1984)

Sejak rezim Soeharto memang telah dilakukan floating mass, depolitisasi, deparpolisasi, deidiologisasi parpol, sensor dan kontrol yang ketat terhadap media massa, pembungkaman terhadap gerakan radikal, dan rezim melakukan pengontrolan partisipasi politik melalui cara korporasi.

Di dalam represifitas politik, sebagai pseduo-idologi stabilitas nasional, inilah pembangunan yang berorientasi ekspor dilaksanakan presiden Soeharto. Dengan menyediakan stabilitas nasional yang kuat dan regimentasi politik yang ketat itulah investasi dari luar negeri mulai menumpuk ke Indonesia. Sehingga di tahun

1970-an pertumbuhan ekonomi mengalami kecepatan yang belum pernah dialami sebelumnya.

Menurut William Liddle, keberhasilan rezim Soeharto dalam melaksanakan pembangunan dan penyelesaian secara atas persoalan politik yang muncul merupakan legitimasi penting sekali bagi rezim Soeharto. Liddle menyebutnya sebagai legitimasi penampilan. Sebab tanpa legitimasi yang kuat rezim Soeharto akan terjebak ke dalam persoalan politik yang disebabkan pluralitas sosial dan politik masyarakat seperti jaman Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Karena itu rezim Soeharto dalam melakukan pembangunan memberi kesempatan yang sangat besar kepada birokrasi, teknokrat, militer dan kekuatan swasta yang profesional dan politik.

Dalam periode orde baru inilah kita menyaksikan merosotnya kekuatan ekonomi pribumi muslim dan dikooptasinya sebagai besar kelompok abangan - PNI di dalam birokrasi pemerintahan ( di dalam propinsi ke bawah di seluruh Indonesia) untuk monoloyalitas kepada pemerintah (Golkar).

Serangkaian regimentasi sosial dan politik rezim Soeharto itu menyebabkan kekuatan birokrasi dan militer mempunyai kesempatan yang besar sekali untuk melahirkan pimpinan nasional yang kuat dan populer. Seorang yang mempunyai kemampuan terbatas dan tidak populer sama sekali apabila dia menguasai birokrasi pemerintah maka dia mampu memobilisir masyarakat, terutama untuk kepentingan pelaksanaan program negara. Bahkan di dalam kantong-kantong kekuatan Islam-pun mampu dimobilisir oleh pimpinan birokrasi yang awalnya abangan dan tidak dikenal di kalangan masyarakat. Lihat safari ramadhan yang pernah dilakukan oleh Harmoko ketika menjadi Menteri Penerangan di pondok - pondok pesantren.

Karena itu tidak heran kalau periode Demokrasi Pancasila memunculkan tokoh dan pimpinan berasal dari militer dan birokrasi. Mereka merupakan elit strategis yang masyarakat di dalam berbagai sektor kehidupan sosial. Jaringan birokrasi dan militer yang merupakan instrumen pembangunan penting dan sekaligus pengontrol perilaku masyarakat menyebabkan para elit strategis menjadi pimpinan formal

masyarakat yang efektif.

Jaringan birokrasi dan militer dalam masyarakat itulah yang menyebabkan mereka secara struktural mampu memobilisasi ideologi negara. Pancasila sebagai azas tunggal, kepada seluruh lapisan sosial masyarakat Indonesia untuk mencapai hegemoni negara.

### III Kekuatan Rezim Soeharto

Rezim Soeharto yang mengintrodusir investasi dan membuka ekonomi pasar menyebabkan sistem perekonomian negara cenderung kapitalis. Dalam perkembangan sistem perekonomian kapitalisme akhirnya akan mendorong lahirnya kelas enterprener, kelas menengah yang pada akhirnya memberi kontribusi cukup berarti bagi perkembangan demokrasi. Masyarakat akan semakin prural, baik dalam konteks sosial, ekonomi dan politik. Pluralitas yang semakin meluas ini bisa menyebabkan destruction masyarakat atas persepsi dan evaluasi ideologi negara Pancasila.

Dengan memobilisasi ideologi negara rezim mengharapkan proses sosial-ekonomi yang semakin kapitalis bisa "dikendalikan" menuju ke formal sosial yang dianggap mereka "Pancasilais". Transformasi ideologi negara, dengan reinterpretasi rezim, dalam mode produksi kapitalis untuk menuju formasi sosial yang "Pancasilais" merupakan aspek yang penting sekali untuk menerangkan semakin menguatnya negara, meskipun mode produksi semakin kapitalistis.

Sistem ekonomi bisa berubah-ubah atau dilakukan berbagai tindakan yang inkremental, akan tetapi sistem politik tetap otoriter dan bahkan sering kali nampak totaliter.

Serangkaian regimentasi sosial ekonomi ini menyebabkan negara kuat sekali dan masyarakat dalam kondisi tersubordinasi. Hal ini menyebabkan hirarki kekuasaan tidak lagi bersifat primordial, akan tetapi lebih bergeser ke arah pragmatis - statis (satis di sini dalam arti negara), dalam arti masyarakat tidak lagi bergantung pada kekuasaan negara, baik melalui birokrasi dan militer. Di dalam periode sistem politik Demokrasi Parlementer dan Terpimpin, seorang tokoh HMI sering mempunyai patron di Masyumi untuk bisa membina karier kekuasaan lebih atas. Tokoh

GMNI mempunyai patron di dalam PNI. Akan tetapi saat ini berbagai tokoh mahasiswa, parpol, dan bisnis sangat bergantung kepada tokoh-tokoh atau pimpinan birokrasi dan militer.

Sedangkan untuk mengendalikan pluralitas di dalam masyarakat Rezim Soeharto menggunakan strategi Korporasi. Menurut Alfred Stepan korporatisme menunjuk pada sekumpulan kebijaksanaan khusus dan peraturan kelembagaan untuk membentuk perwalian dan kepentingan. Bila pengaturan ini berjalan dengan baik, biasanya negara mengatur, bahkan menciptakan kelompok-kelompok kepentingan. Jadi semacam kesan monopoli perwakilan serat beberapa hak istimewa tertentu. Sebagai imbalan atas hak-hak istimewa dan monopoli tersebut, negara menuntut haknya untuk mengamati kelompok-kelompok ini melalui berbagai macam cara supaya bisa mencegah dinyatakannya tuntutan "sempit" berdasarkan kelas sosial yang mengandung benih persengketaan tersebut.

Saat ini kita mengenal kumpulan para ulama dalam wadah MUI. Para wartawan dikantongi dalam PWI. Para muda dan mahasiswa diletakkan dalam KNPI. Sedangkan para pengacara dan dan advokat dimasukkan dalam IKADIN. Para pengusaha diwadahi dalam KADIN. Dan para buruh dikontrol dalam SPSI dan lain sebagainya.

Akibat pimpinan korporasi tersebut biasanya "ditentukan" atau paling tidak "direstui" negara. Ini para pimpinan yang muncul dari korporasi tersebut sangat bergantung dari pimpinan negara atau birokrasi maupun militer yang memegang posisi strategis. Dari sini nampak dalam struktur politik, bahwa dalam sistem politik ada 3 hirarki kepemimpinan. Yaitu pimpinan korporasi yang bergantung kepada pimpinan strategis, baik dari birokrasi maupun militer, dan pimpinan strategis pada akhirnya sangat bergantung kepada pimpinan nasional, yaitu Soeharto.

Sejak rezim Soeharto berkuasa, kekuasaan negara cenderung dipusatkan kepada kewibawaan presiden. Berkali-kali Soeharto mengungkapkan bahwa Indonesia tidak mengenal oposisi, paling tidak secara formal. Menurut Ben Anderson dalam kekuasaan Jawa mengenal hukum kompensasi, yaitu jika muncul oposisi, maka semakin semakin merosot pula power raja. Untuk menguncupkan

kekuasaan hanya kepada presiden, maka sering kali memasang pemimpin militer strategis yang mempunyai cacat politis tertentu. Cacat politis itu, menurut Anderson, seperti Bukan Islam, bukan Jawa, dan sering kali mereka yang pernah menduduki posisi kunci di lembaga intelegen. Karena itu Pangab seringkali memenuhi ketiga cacat tersebut. Hal ini bagi Anderson dimaksudkan untuk mempertahankan keamanan dan sekaligus kewibawaan Presiden Soeharto.

Karena itu ada anggapan, selama Rezim Soeharto banyak Jenderal yang tidak mempunyai kepercayaan diri yang kuat ketika berhadapan dengan presiden. Sehingga baik di kalangan militer, politisi sipil dan pimpinan ekonomi, Presiden Soeharto adalah tokoh senior yang paling berwibawa dan pusat kekuasaan.

Presiden Soeharto adalah Ketua Dewan Pembina Pusat Golkar yang mempunyai pengaruh besar atas policy global Golkar. Sebagian besar anggota DPR dan MPR adalah dari Golkar dan militer serta ditambah Fraksi Utusan Daerah (biasanya diambil dari pimpinan militer, birokrasi, intelektual Golkar, dan tokoh masyarakat yang berafiliasi ke Golkar), sehingga sulit membayangkan adanya tokoh masyarakat yang populer lahir dan melakukan oposisi kepada kekuatan Soeharto, khususnya yang ada di DPR dan MPR.

Dalam struktur kekuatan seperti ini sangat masuk akal kalau Jenderal (Purn) Soeharto bisa dipilih kembali menjadi Presiden sampai ke-enam kalinya. Sebab struktur kekuasaan di bawahnya sangat mendukung pola kepemimpinan yang dia ciptakan sendiri. Karena itu polakekuasaan dan kepemimpinan politik negara Indonesia selama rezim Soeharto berkuasa semakin menguncup.

#### IV. Suksesi Kepemimpinan Nasional Yang dipersiapkan

Perlukah suksesi dipersiapkan terlebih

dahulu atau berdasarkan proses alamiah? Banyak penganut politik dan sosial percaya bahwa kepemimpinan Soeharto akan berakhir padatahun 1997/1998 karena pada saat itu Soeharto diramalkan sudah tidak sanggup lagi memegang jabatan presiden Indonesia selama enam periode. Namun kenyataan berbicara lain karena saat pasca pemilu 1997 berakhir, sebagian besar masyarakat dan rakyat Indonesia ada keinginan untuk memilih kembali "Pak Harto" pada Sidang Umum MPR tahun 1988, maka yang justru diributkan adalah wakil presiden, yang besar kemungkinan secara tidak langsung sebagai top figur pada pergantian presiden mendatang. Wakil presiden periode 1998 - 2003 adalah posisi sangat strategis untuk dapat menerima tongkat estafet atau pengalihan jabatan presiden Indonesia yang ketiga. Kemudian siapa yang paling menentukan dalam melahirkan pemimpin baru? Apakah sidang umum MPR berperan mutlak atautkah cara-cara lain yang selama ini sangat ditakuti dan tidak dikehendaki oleh para elit politik tingkat pusat. Jawabannya adalah kondisi dan situasi yang akan

hadir menjelang Sidang Umum MPR mendatang, siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan baik secara pribadi maupun secara struktural dialah yang akan menerima estafet kepemimpinan di masa mendatang.

#### V PENUTUP

Untuk memprediksi penguasa dimasa depan untuk Republik ini agaknya sulit. Karena sistem politik di Indonesia yang masih belum

demokratis akan mempersulit proses rekrutmen yang selama ini masih cenderung diwarnai model paternalistik dan patrimonial yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan sumber kekuasaan. (\*\*\*)

*Perlukah suksesi dipersiapkan terlebih dahulu atau berdasarkan proses alamiah? Banyak penganut politik dan sosial percaya bahwa kepemimpinan Soeharto akan berakhir padatahun 1997/1998 karena pada saat itu Soeharto diramalkan sudah tidak sanggup lagi memegang jabatan presiden Indonesia selama enam periode. Namun kenyataan berbicara lain karena saat pasca pemilu 1997 berakhir, sebagian besar masyarakat dan rakyat Indonesia ada keinginan untuk memilih kembali "Pak Harto" pada Sidang Umum MPR tahun 1988,*